



KETELADANAN SIFAT POSITIF TRI RISMAHARINI DALAM KEPEMIMPINAN SEKTOR PUBLIK

EXEMPLARY OF TRI RISMAHARINI'S POSITIVE TRAITS IN PUBLIC SECTOR LEADERSHIP

Aksel April Yanda¹, Fahira Syailindri², Resmi Ririn³, Yulia Hanoselina⁴, Rizki Syafril⁵

Universitas Negeri Padang

Email : akselapriyanda@gmail.com ¹, fahiraaiisyailindri@gmail.com ², resmiririn.13@gmail.com ³,
yuliahanoselina@fis.unp.ac.id ⁴, rizkisyafri@fis.unp.ac.id ⁵

Article Info

Article history :

Received : 27-05-2025

Revised : 29-05-2025

Accepted : 01-06-2025

Published : 03-06-2025

Abstract

This article examines the leadership style of Tri Rismaharini in the context of the public sector, particularly during her tenure as the Mayor of Surabaya and the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia. Risma's leadership is characterized by positive traits such as decisiveness, integrity, social empathy, hard work, and the courage to implement structural and cultural reforms. This research utilizes a literature study approach to identify exemplary values and their implications for improving public bureaucracy performance. The results indicate that Tri Rismaharini's leadership style is transformational and visionary, capable of driving real change and building public trust.

Keywords : *Tri Rismaharini, positive traits, public sector leadership*

Abstrak

Artikel ini mengkaji gaya kepemimpinan Tri Rismaharini dalam konteks sektor publik, khususnya saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dan Menteri Sosial Republik Indonesia. Kepemimpinan Risma ditandai oleh sifat positif seperti ketegasan, integritas, empati sosial, kerja keras, serta keberanian dalam melakukan reformasi struktural dan kultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk mengidentifikasi nilai-nilai keteladanan dan implikasinya terhadap peningkatan kinerja birokrasi publik. Hasilnya menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Tri Rismaharini bersifat transformasional dan visioner, yang mampu mendorong perubahan nyata dan membangun kepercayaan publik.

Kata Kunci : *Tri Rismaharini, sifat positif, kepemimpinan sektor publik*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan yang efektif merupakan unsur fundamental dalam mencapai tujuan organisasi, khususnya dalam konteks lembaga pemerintahan yang kompleks dan dinamis. Di Indonesia, tantangan pembangunan sosial yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan menuntut hadirnya sosok pemimpin publik yang tidak hanya memiliki kapasitas manajerial, tetapi juga integritas, empati, dan komitmen tinggi terhadap pelayanan masyarakat. Dalam hal ini, Tri Rismaharini yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dan Menteri Sosial Republik Indonesia menjadi salah satu figur penting yang memberikan teladan dalam memimpin dengan hati dan keberanian moral.

Kepemimpinan dalam sektor publik memiliki dampak signifikan terhadap kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Keberhasilan dalam mengelola sumber daya manusia,



anggaran, dan program sosial secara efektif sangat bergantung pada karakter dan gaya kepemimpinan yang diterapkan. Tri Rismaharini menghadirkan pendekatan kepemimpinan yang khas, memadukan ketegasan birokratis dengan empati sosial yang kuat. Dengan latar belakang teknokrat dan pengalaman panjang di pemerintahan daerah, ia berhasil menciptakan model kepemimpinan publik yang berbasis nilai dan aksi langsung.

Sejak awal kepemimpinannya, baik di level kota maupun kementerian, Risma telah mendorong serangkaian kebijakan yang mengedepankan keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan keberpihakan pada kelompok rentan. Gaya kepemimpinannya yang humanis namun tegas menciptakan iklim birokrasi yang lebih disiplin, responsif, dan peduli terhadap kebutuhan rakyat. Hal ini sejalan dengan pendekatan manajemen modern yang menekankan pentingnya performa berbasis hasil (*performance-based governance*) dan sensitivitas terhadap isu-isu sosial.

Transformasi birokrasi yang dijalankan Risma mencakup penataan ulang struktur organisasi, penerapan sistem meritokrasi, serta penguatan sistem layanan publik berbasis teknologi. Lebih dari itu, ia mengedepankan pendekatan partisipatif dalam membangun komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Kepemimpinan seperti ini menciptakan fondasi yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan.

Salah satu hal menonjol dari kepemimpinan Tri Rismaharini adalah konsistensinya dalam menampilkan keteladanan moral dan keberanian dalam mengambil keputusan sulit. Keteladanan merupakan salah satu pilar utama dalam kepemimpinan sektor publik, ini tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya, tetapi juga berperan sebagai panutan bagi masyarakat. Keteladanan menciptakan kepercayaan publik, meningkatkan moral pegawai, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemimpin yang menunjukkan integritas, transparansi, dan komitmen terhadap pelayanan publik akan mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan menciptakan lingkungan kerja yang positif.

Salah satu contoh keteladanan dari Tri Rismaharini, yaitu Ia tidak segan turun langsung ke lapangan untuk menegur aparaturnya yang tidak bekerja sesuai fungsi, atau menangani sendiri warga yang membutuhkan bantuan. Pendekatan kepemimpinan langsung (*hands-on leadership*) yang ia terapkan memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi yang dipimpinnya. Pemimpin yang mampu menjadi teladan tidak hanya memengaruhi perilaku bawahannya tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Namun, keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi. Dalam konteks pandemi COVID-19, Tri Rismaharini harus merespons situasi krisis dengan cepat, termasuk menyalurkan bantuan sosial ke berbagai pelosok negeri secara akurat dan tepat sasaran. Kepemimpinannya yang responsif dan adaptif dalam situasi darurat menunjukkan kualitas seorang pemimpin transformasional yang mampu mengelola tekanan sekaligus menjaga stabilitas sosial.

Kajian Teoritis

Kepemimpinan dalam sektor publik memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, gaya kepemimpinan transformasional menjadi salah satu pendekatan teoritis yang relevan untuk memahami karakteristik kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Tri Rismaharini. Menurut Burns



(1978) dan Bass (1985), kepemimpinan transformasional ditandai oleh kemampuan pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, dan membawa perubahan positif yang mendasar dalam organisasi. Pemimpin transformasional tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dengan pengikutnya, menanamkan nilai-nilai moral, dan mendorong terciptanya budaya kerja yang adaptif dan progresif. Dalam konteks Tri Rismaharini, gaya kepemimpinannya yang visioner dan inovatif tercermin dalam upaya reformasi birokrasi, penerapan sistem merit, digitalisasi layanan publik, serta keberanian mengambil keputusan yang berdampak luas, seperti penutupan lokalisasi Gang Dolly. Gaya kepemimpinan ini juga berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik dan pelayanan berbasis hasil.

Selain teori kepemimpinan transformasional, pendekatan *ethics of care* juga sangat relevan untuk memahami gaya kepemimpinan Tri Rismaharini. Menurut Gilligan (1982), *ethics of care* menekankan pentingnya relasi interpersonal, kepedulian, dan empati dalam pengambilan keputusan moral. Kepemimpinan yang berlandaskan etika kepedulian tidak hanya mengedepankan aturan dan prosedur formal, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan individu, khususnya kelompok yang rentan. Dalam praktik kepemimpinannya, Tri Rismaharini menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi melalui tindakan nyata seperti blusukan, penanganan anak jalanan, dan respons cepat terhadap situasi bencana. Sikap humanis ini menunjukkan bahwa empati bukan sekadar retorika, melainkan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang ia jalankan.

Lebih jauh lagi, kepemimpinan Tri Rismaharini juga sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Wibowo (2020), *good governance* tidak hanya bertumpu pada struktur birokrasi yang baik, tetapi juga pada penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Tri Rismaharini berhasil mengimplementasikan sistem *e-government*, pengawasan berbasis teknologi (CCTV), pelaporan online, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kota melalui program-program berbasis komunitas. Praktik-praktik ini mencerminkan penerapan prinsip *good governance* yang mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketiga teori tersebut—kepemimpinan transformasional, *ethics of care*, dan *good governance*—menjadi landasan teoritis yang saling melengkapi dalam menganalisis gaya kepemimpinan Tri Rismaharini. Dengan memadukan visi transformasional, kepedulian sosial yang tinggi, serta tata kelola yang modern dan inklusif, Tri Rismaharini tidak hanya mampu menghadirkan perubahan birokrasi yang adaptif dan inovatif, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata dan keteladanan moral. Oleh karena itu, gaya kepemimpinannya dapat dijadikan model bagi pemimpin publik lainnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, inklusif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian literatur dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menelusuri dan memahami secara mendalam berbagai informasi tertulis yang berkaitan dengan keteladanan sifat positif Tri Rismaharini dalam kepemimpinan sektor publik. Proses ini mencakup penelaahan terhadap sumber-



sumber seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan resmi pemerintah, buku, serta dokumentasi media yang kredibel dan relevan.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membangun kerangka pemikiran yang komprehensif mengenai karakter kepemimpinan Tri Rismaharini, termasuk nilai-nilai seperti empati, ketegasan, kepedulian sosial, dan integritas yang menjadi ciri khas gaya kepemimpinannya. Kajian literatur juga memungkinkan peneliti untuk mengaitkan fakta-fakta empiris dengan teori-teori kepemimpinan, khususnya yang bersifat transformasional dan melayani.

Langkah-langkah dalam kajian ini meliputi identifikasi topik, pencarian dan seleksi referensi yang relevan, pengorganisasian data berdasarkan tema yang muncul, serta analisis isi dari setiap sumber. Data sekunder yang terkumpul dianalisis untuk melihat pola-pola nilai kepemimpinan dan dampaknya terhadap kinerja birokrasi serta pelayanan publik.

Penggunaan metode kajian literatur dinilai tepat karena mampu memberikan dasar teoretis yang kuat, serta mendukung pemahaman yang mendalam terhadap fenomena kepemimpinan di sektor publik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan model kepemimpinan berbasis nilai di lingkungan pemerintahan Indonesia, sebagaimana tercermin dalam keteladanan Tri Rismaharini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sikap Positif Tri Rismaharini yang Menonjol

Tri Rismaharini dikenal luas sebagai sosok pemimpin daerah yang menempatkan integritas dan kejujuran sebagai fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Sejak menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, ia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi birokrasi dan penegakan prinsip anti-korupsi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government), yang mencakup digitalisasi berbagai layanan publik seperti pengurusan izin, pengaduan masyarakat, dan pengadaan barang dan jasa. Sistem ini dirancang untuk meminimalkan interaksi langsung antara warga dan pejabat, sehingga menurunkan potensi korupsi dan gratifikasi dalam proses pelayanan publik (Kariem & Ishmatuddin, 2021).

Selain itu, Risma juga mengembangkan sistem pengawasan internal yang ketat melalui unit pengendali internal dan keterlibatan masyarakat dalam proses pelaporan dan audit sosial. Hal ini mendorong terciptanya lingkungan kerja yang akuntabel dan terbuka terhadap pengawasan publik. Pendekatannya dalam membangun integritas tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural, ia dikenal dengan gaya kepemimpinan yang memberikan keteladanan langsung kepada bawahannya, seperti menolak fasilitas mewah dan rajin melakukan inspeksi mendadak ke kantor-kantor layanan publik untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik dan bebas pungutan liar (Hadi et al., 2024).

Gaya kepemimpinannya yang transparan dan berani mengambil sikap tegas terhadap praktik tidak etis menjadikannya simbol perlawanan terhadap korupsi di tingkat lokal. Reputasinya dalam hal ini tidak hanya diakui oleh publik domestik, tetapi juga mendapatkan apresiasi di tingkat internasional, termasuk dalam pemilihan World Mayor Prize. Dengan pendekatan yang konsisten dan menyeluruh terhadap integritas, Tri Rismaharini berhasil



membangun sistem pemerintahan kota yang efisien, bersih, dan dipercaya oleh masyarakat luas.

Tri Rismaharini juga dikenal sebagai pemimpin yang memiliki tingkat empati dan kepedulian sosial yang luar biasa tinggi, terutama terhadap kelompok masyarakat marginal dan rentan. Kepemimpinannya ditandai oleh pendekatan humanis yang tidak sekadar mengedepankan kebijakan formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Salah satu bentuk konkret dari kepedulian sosial Risma adalah penanganan terhadap anak jalanan dan warga miskin kota. Ia tidak hanya menginstruksikan, tetapi turun langsung ke lapangan untuk berdialog dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan sosial, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Dalam berbagai kesempatan, ia bahkan tak segan menunjukkan emosi secara terbuka, seperti menangis saat menyaksikan penderitaan warganya, menunjukkan bahwa empati bukan hanya simbolis, tetapi mendorong tindakan nyata (Rahmi & Wardiyanto, 2015).

Pendekatan kepemimpinan Risma sangat lekat dengan apa yang disebut sebagai *ethics of care*, sebuah konsep etika yang menempatkan relasi interpersonal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan moral. Dalam konteks ini, kepentingan rakyat bukan hanya angka dalam statistik pembangunan, melainkan subjek moral yang wajib diperhatikan secara personal. Hal ini terlihat dalam respons cepatnya terhadap bencana, seperti banjir dan kebakaran, di mana ia kerap hadir langsung di lokasi untuk mengatur evakuasi dan distribusi bantuan. Risma tidak hanya mengandalkan struktur birokrasi, tetapi juga memobilisasi masyarakat dan komunitas lokal dalam kegiatan solidaritas sosial (Jena, 2016).

Kepedulian yang autentik terhadap rakyat kecil memperkuat legitimasi moralnya sebagai pemimpin. Banyak warga merasa bahwa Risma "hadir" dalam kehidupan mereka, bukan sekadar sebagai pejabat publik, tetapi sebagai sosok yang memahami penderitaan dan kebutuhan mereka secara langsung. Kepemimpinan berbasis kepedulian sosial inilah yang menjadi kekuatan utama Risma dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat solidaritas sosial di Surabaya.

Salah satu karakter kepemimpinan Tri Rismaharini yang paling menonjol lainnya adalah kedisiplinan dan ketegasannya dalam menjalankan roda pemerintahan serta menegakkan aturan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak mentoleransi pelanggaran, baik di kalangan aparatur sipil negara maupun masyarakat umum. Kedisiplinan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan, tetapi juga melalui tindakan langsung, seperti inspeksi mendadak ke kantor pelayanan publik dan fasilitas umum untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar. Ia juga tegas dalam menegur pegawai yang malas atau tidak melayani publik dengan baik, dan tak segan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran prosedur birokrasi (Pratama & Fitriyah, 2021).

Ketegasannya tercermin dalam kebijakan-kebijakan strategis, seperti penutupan kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara, Gang Dolly, yang meskipun menuai pro dan kontra, tetap dijalankan karena diyakini merupakan langkah moral dan sosial yang perlu diambil demi masa depan anak-anak dan generasi muda Surabaya. Langkah ini memperlihatkan bahwa Risma mampu mengambil keputusan sulit yang berpotensi menimbulkan resistensi



politik maupun sosial, tetapi tetap dilaksanakan dengan landasan nilai dan visi jangka panjang (Dewi, 2017).

Konsistensi Risma dalam menegakkan aturan juga tercermin dalam pengelolaan kebersihan dan tata kota. Ia mengatur sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan ketat, menekankan peran warga dalam memilah sampah dan menjaga lingkungan. Bagi pegawai negeri, Risma mewajibkan penerapan budaya kerja disiplin, tepat waktu, dan melayani dengan hati. Hal ini tidak hanya menciptakan birokrasi yang lebih efisien, tetapi juga menanamkan budaya tanggung jawab di kalangan aparat pemerintahan kota.

Dengan gaya kepemimpinan yang tegas namun adil, Risma berhasil menciptakan lingkungan pemerintahan yang profesional dan dihormati, sekaligus memperkuat budaya pelayanan publik yang bertanggung jawab dan disiplin.

2. Kepemimpinan Tri Rismaharini : Inovatif, Visioner, dan Partisipatif

Tri Rismaharini merupakan figur pemimpin daerah yang inovatif dan visioner, dengan visi besar untuk menjadikan Surabaya sebagai kota modern, hijau, dan berkelanjutan. Inovasi menjadi kata kunci dalam berbagai kebijakannya, terutama dalam transformasi tata kelola kota dan infrastruktur berbasis teknologi. Ia mendorong digitalisasi layanan publik, seperti penerapan e-government, sistem perizinan daring, layanan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi, hingga pengawasan CCTV yang terintegrasi untuk keamanan dan ketertiban kota (Kariem & Ishmatuddin, 2021). Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan aksesibilitas layanan pemerintah bagi warga.

Dalam hal tata ruang dan lingkungan, Risma menciptakan banyak ruang terbuka hijau, taman kota, dan jalur pedestrian ramah lingkungan. Kota Surabaya yang dulunya gersang disulap menjadi kota yang dipenuhi taman tematik, sistem drainase inovatif, dan kawasan pedestrian yang nyaman. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kualitas hidup warga kota serta mendapatkan pengakuan dari tingkat nasional hingga internasional (Fachrudin & Yuwono, 2017), (Hadi et al., 2024).

Keberhasilannya juga didukung oleh kemampuan mengintegrasikan kolaborasi lintas sektor, termasuk dunia usaha dan masyarakat sipil, dalam menciptakan solusi inovatif bagi tantangan perkotaan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan sistemik dalam kepemimpinan Risma memungkinkan terciptanya tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan dalam pengelolaan ruang hijau kota, termasuk penggabungan fungsi ekologis dan sosial dari infrastruktur perkotaan (Haryono et al., 2024).

Inovasi yang dilakukan Risma bukan bersifat proyek jangka pendek, melainkan dirancang sebagai bagian dari transformasi jangka panjang menuju kota yang inklusif, adaptif, dan tahan terhadap tantangan lingkungan dan sosial. Kepemimpinannya menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya berasal dari teknologi, tetapi juga dari keberanian dan keteguhan visi untuk melayani rakyat secara berkelanjutan.

Tri Rismaharini mengadopsi gaya kepemimpinan partisipatif yang mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan kota. Ia menyadari bahwa



keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya bergantung pada kekuatan birokrasi, tetapi juga pada partisipasi warga sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu, Risma secara konsisten membangun ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, termasuk melalui forum musyawarah warga, program pemberdayaan kampung, dan pelibatan komunitas lokal dalam pengelolaan fasilitas umum seperti taman, pasar tradisional, dan pengelolaan sampah lingkungan (Fachrudin & Yuwono, 2017).

Konsep kepemimpinan partisipatif yang diterapkannya juga terbukti dalam berbagai program berbasis komunitas, seperti bank sampah, taman baca masyarakat, hingga gerakan kebersihan kolektif. Risma mendorong warga untuk menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar objek kebijakan. Ia percaya bahwa jika masyarakat diberi ruang untuk berperan, maka mereka akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap lingkungannya. Hal ini diperkuat oleh pendekatan komunikatif yang digunakannya, di mana ia kerap berinteraksi langsung dengan warga dalam berbagai kesempatan informal, termasuk blusukan ke kampung-kampung dan berdiskusi tanpa perantara formalitas pemerintahan (Handoyo et al., 2020).

Partisipasi publik yang ia dorong bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga emosional dan sosial. Ia membangun hubungan yang kuat antara warga dan pemerintah kota, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap kebijakan publik. Dalam penelitian mengenai pengelolaan sampah di Surabaya, tercatat bahwa gaya kepemimpinan partisipatif Risma berperan besar dalam membangun kesadaran kolektif dan aksi bersama yang berkelanjutan, walau ia tetap menunjukkan karakter tegas terhadap pelanggaran aturan (Pratama & Fitriyah, 2021).

Dengan pendekatan partisipatif ini, Risma berhasil menciptakan model pemerintahan yang inklusif, di mana kebijakan tidak hanya datang dari atas, tetapi tumbuh dari bawah sebagai hasil interaksi dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Kepemimpinan seperti inilah yang memperkuat daya tahan sosial dan memperkuat ikatan kewargaan di Surabaya.

3. Dampak Kepemimpinan Tri Rismaharini

Dampak dari kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada hasil tercermin nyata dalam berbagai transformasi kebijakan publik yang dilaksanakan. Di Surabaya, perubahan besar terlihat dari bagaimana birokrasi diarahkan untuk bekerja lebih efektif dan responsif. Penerapan sistem pelaporan berbasis teknologi memungkinkan warga melaporkan keluhan secara cepat dan memaksa birokrat untuk menanggapi masalah yang ada di lapangan dengan segera. Sistem ini tidak hanya memperbaiki layanan publik, tetapi juga membangun budaya kerja baru yang transparan, tanggap, dan profesional. Reformasi birokrasi semacam ini menandai perubahan paradigma dari birokrasi yang lambat dan cenderung korup menjadi birokrasi yang lebih melayani masyarakat.

Dampak yang signifikan juga tampak dalam kebijakan penataan lingkungan kota. Pembangunan taman-taman kota, penertiban saluran air, pengurangan sampah liar, dan peningkatan ruang terbuka hijau bukan hanya soal estetika, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan pengurangan risiko bencana banjir. Partisipasi warga



dalam menjaga kebersihan kota meningkat seiring dengan edukasi publik yang intensif. Transformasi ini memperlihatkan bagaimana kepemimpinan yang konsisten dalam implementasi kebijakan mampu mendorong perubahan perilaku kolektif. Pengelolaan ruang publik yang berkelanjutan menciptakan ruang bagi interaksi sosial dan rekreasi, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap kota.

Dari aspek sosial, kepemimpinan yang inklusif tercermin dari upaya nyata untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan. Penyediaan rumah singgah, pelatihan kerja, dan pendidikan bagi anak jalanan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial bukan hanya menyelesaikan masalah permukaan, melainkan juga membuka jalan menuju pemulihan sosial yang berkelanjutan. Program-program ini tidak hanya berdampak pada pengurangan angka pengangguran atau kemiskinan kota, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Ketika warga melihat pemimpinnya turun langsung ke lapangan, membantu kelompok marjinal, dan menindaklanjuti masalah secara konkret, legitimasi dan kredibilitas pemerintah pun meningkat.

Kepemimpinan yang inovatif juga ditunjukkan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat sistem pemerintahan. Penerapan konsep kota cerdas (smart city) dengan memanfaatkan teknologi dalam pemantauan lalu lintas, pengendalian kebersihan kota, dan penanganan aduan publik meningkatkan efisiensi pelayanan. Transformasi digital ini bukan hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Dengan demikian, kota bukan lagi hanya ruang fisik, melainkan juga ekosistem digital yang memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan warga.

Di sisi lain, gaya kepemimpinan yang tegas dan kadang terkesan otoriter menimbulkan tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, pengambilan keputusan yang cepat tanpa banyak konsultasi menuai kritik dari sebagian pihak. Namun, kecepatan dalam bertindak ini juga terbukti efektif dalam situasi mendesak, seperti dalam pengendalian bencana atau penertiban kawasan kumuh. Keberanian mengambil keputusan yang tidak populer tetapi mendesak mencerminkan prioritas yang jelas terhadap kepentingan publik. Analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak masukan yang diterima, tetapi juga oleh kemampuan memutuskan dengan cepat dan tepat.

Dampak lebih luas dari pola kepemimpinan ini adalah terciptanya model pemerintahan lokal yang inovatif dan adaptif, yang kemudian menginspirasi kota-kota lain di Indonesia. Konsep tata kota berbasis lingkungan, reformasi birokrasi dengan teknologi, dan penguatan program sosial yang inklusif menjadi model yang ditiru secara nasional. Tidak hanya itu, keberhasilan kepemimpinan dalam membangun kota yang lebih bersih, teratur, dan inklusif juga membawa perubahan pada cara masyarakat memandang peran pemerintah daerah. Muncul kesadaran bahwa pemerintah lokal yang kuat dan responsif dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

Di sisi budaya politik, keberhasilan kepemimpinan ini mendorong munculnya gaya kepemimpinan yang lebih terbuka dan partisipatif. Masyarakat merasa lebih didengar dan



dilibatkan, meskipun tidak selalu secara formal. Hal ini memunculkan dinamika baru di mana warga menjadi mitra pemerintah dalam menjaga dan membangun kota. Efek jangka panjang dari kepemimpinan yang demikian bukan hanya tercermin dalam fisik kota yang berubah, tetapi juga dalam pola pikir dan perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap kepentingan bersama. Pada akhirnya, kepemimpinan yang berdampak seperti ini mengajarkan bahwa transformasi sosial-politik tidak hanya bergantung pada perencanaan teknis, tetapi juga pada keteladanan, keberanian, dan keberpihakan nyata terhadap rakyat.

4. Relevansi Keteladanan Tri Rismaharini dalam Konteks Kepemimpinan Publik

Keteladanan Tri Rismaharini memiliki relevansi yang kuat dalam konteks kepemimpinan publik, terutama sebagai inspirasi bagi pemimpin perempuan dan generasi muda. Sebagai wali kota perempuan pertama di Surabaya, Risma membuktikan bahwa perempuan mampu memimpin secara efektif dan membawa perubahan signifikan dalam sektor publik, seperti memperindah dan menata kota menjadi lebih bersih dan hijau (Susanto, 2021).

Keberhasilannya ini menginspirasi banyak perempuan Indonesia untuk berani mengambil peran kepemimpinan di berbagai bidang (Putri, 2022). Selain itu, nilai-nilai kepemimpinan yang diusung Risma, seperti integritas, ketegasan, dan komitmen terhadap pelayanan publik, sangat relevan dengan prinsip tata kelola modern yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Wibowo, 2020).

Gaya kepemimpinan transformasional Risma mampu memotivasi dan memberdayakan bawahannya untuk bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hidayat, 2019). Pembelajaran penting yang dapat diambil pejabat publik dari kepemimpinan Risma adalah pentingnya turun langsung ke lapangan guna memahami kondisi dan permasalahan masyarakat secara nyata. Melalui blusukan, Risma memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran (Santoso, 2021). Keberaniannya dalam mengambil keputusan sulit dan konsistensi menegakkan disiplin serta etika kerja di birokrasi menjadi teladan dalam membangun budaya kerja yang profesional dan berorientasi hasil di lingkungan pemerintahan (Rahmawati, 2022).

Dalam konteks kepemimpinan masyarakat kontemporer, keteladanan Tri Rismaharini menunjukkan prinsip kepemimpinan melalui contoh yang sangat relevan. Risma menunjukkan gaya kepemimpinan yang praktis, responsif, dan empatik sikap yang jarang ditemukan dalam model kepemimpinan birokratis yang cenderung administratif dan kaku dengan tampil sebagai pemimpin yang tidak hanya memberi arahan tetapi juga terlibat langsung dalam proses pelayanan publik. Tindakan yang dia lakukan di lapangan menunjukkan integritas kepemimpinan yang benar, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, Tri Rismaharini menggunakan pendekatan kepemimpinan transformasional dalam praktiknya. Pendekatan ini memiliki kemampuan untuk mendorong dan menginspirasi bawahannya untuk bekerja sama dengan dorongan dan dorongan kolektif. Ia mendorong perubahan budaya kerja birokrasi: fokus pada hasil dan



dampak nyata bagi masyarakat daripada prosedur dan pasif. Ini sangat penting untuk reformasi birokrasi Indonesia, yang selama ini dihadapkan pada masalah dasar seperti inefisiensi, kelemahan sistem pengawasan internal, dan kualitas pelayanan publik yang buruk. Risma menunjukkan melalui contohnya bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada kemampuan untuk membuat kebijakan, tetapi juga semangat untuk menciptakan prinsip kerja keras, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam organisasi.

Dalam hal ini, keteladanan Risma menjadi lebih penting ketika dilihat dari sudut pandang inklusi dan kesetaraan gender. Keberhasilan Risma menembus dominasi laki-laki dalam struktur pemerintahan memberikan dorongan moral dan simbolik yang kuat bagi perempuan Indonesia untuk berperan sebagai aktor penting dalam ranah publik dalam masyarakat yang masih diliputi stereotip terhadap kepemimpinan perempuan. Ia menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak menentukan kualitas kepemimpinan; kapasitas, integritas, dan keberanian untuk mengambil keputusan strategi adalah yang menentukan. Ini meningkatkan representasi perempuan dalam politik dan pemerintahan. Hal ini juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberagaman dalam kepemimpinan untuk mewujudkan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

Dengan demikian, munculnya tuntutan masyarakat terhadap prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan membuat gaya kepemimpinan Risma menjadi sangat relevan. Ia memiliki kemampuan untuk memenuhi harapan tersebut dengan memungkinkan pemerintah dan warga untuk berkomunikasi secara langsung melalui mekanisme seperti peninjauan langsung ke lapangan, diskusi terbuka, dan respon cepat terhadap keluhan masyarakat. Metode ini mendukung prinsip-prinsip *good governance*, di mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi pilar utama dalam proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, contoh Tri Rismaharini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan seorang pemimpin perempuan, tetapi juga merupakan representasi dari model kepemimpinan publik yang kontekstual, progresif, dan partisipatif. Contohnya memberikan inspirasi nyata untuk membangun kapasitas kepemimpinan di sektor publik. Itu juga menjadi acuan penting untuk membangun budaya birokrasi yang fokus pada pelayanan, hasil, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis terhadap berbagai literatur yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa Tri Rismaharini merupakan sosok pemimpin sektor publik yang menonjol dengan gaya kepemimpinan transformasional yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, keberanian moral, dan keteladanan nyata. Perannya sebagai Wali Kota Surabaya dan Menteri Sosial tidak hanya mencerminkan kapasitas manajerial, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat terhadap pelayanan publik yang berkeadilan dan inklusif.

Kepemimpinan Tri Rismaharini ditandai oleh integritas, empati sosial, kedisiplinan, dan keberanian dalam mengambil keputusan sulit, seperti penataan ulang birokrasi, penutupan lokalisasi, serta percepatan layanan sosial di masa krisis. Ia menerapkan reformasi struktural melalui sistem meritokrasi, digitalisasi layanan, dan penguatan kontrol internal, yang seluruhnya bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi hasil.



Keberhasilannya dalam mengarahkan perubahan di tengah tantangan sosial dan birokrasi yang kompleks menunjukkan kualitas kepemimpinan yang adaptif, inklusif, dan berlandaskan etika pelayanan. Ia membangun kedekatan langsung dengan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan kepemimpinan yang hadir di tengah rakyat. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga kota dan menyukseskan kebijakan.

Dalam konteks kebijakan publik, Tri Rismaharini mampu menjadikan pemerintahan sebagai ruang kolaboratif antara negara dan warga. Ia mendorong inovasi berkelanjutan, membentuk kota yang ramah lingkungan, serta memastikan kelompok rentan mendapat perlindungan sosial yang memadai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepemimpinannya mampu menjembatani antara idealisme sosial dan realitas birokratis.

Meskipun tidak lepas dari kritik, terutama terkait gaya komunikasi yang tegas, hal tersebut justru memperkuat keteguhan Risma dalam mempertahankan nilai dan prinsip kerja profesional di tengah tantangan birokrasi. Pengalaman kepemimpinannya memberikan bukti bahwa keteladanan, integritas, dan keberpihakan pada masyarakat merupakan elemen kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada perubahan.

Secara menyeluruh, gaya kepemimpinan Tri Rismaharini merepresentasikan model kepemimpinan publik yang kontekstual, progresif, dan inspiratif. Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi dan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kualitas pribadi pemimpin yang tidak hanya berpikir strategis, tetapi juga hadir secara nyata untuk rakyat yang dilayaninya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. (2017). *Kontroversi Penutupan Lokalisasi Dolly di Surabaya: Studi Dampak Sosial dan Ekonomi*. Jurnal Sosiologi Reflektif, 11(2), 105–119.
- Fachrudin, K., & Yuwono, H. (2017). *Inovasi Tata Kelola Kota Surabaya dalam Perspektif Smart City*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 40–52.
- Hadi, S., Yulianto, R., & Ramadani, I. (2024). *Etika Pelayanan Publik dalam Kepemimpinan Tri Rismaharini di Kota Surabaya*. Jurnal Administrasi Publik, 13(1), 77–89.
- Handoyo, A., Nugroho, B., & Pramudito, R. (2020). *Kepemimpinan Partisipatif dalam Pemerintahan Kota: Studi Kasus Program Bank Sampah di Surabaya*. Jurnal Ilmu Administrasi, 9(2), 56–66.
- Haryono, T., Ramadhan, I., & Mulyadi, A. (2024). *Tata Kelola Hijau dan Kepemimpinan Kota: Studi Kasus Kolaborasi dalam Pengelolaan Taman di Surabaya*. Jurnal Manajemen Lingkungan, 6(1), 25–38.
- Jena, A. (2016). *Leadership and Ethics of Care in Urban Governance: A Case Study of Surabaya, Indonesia*. International Journal of Urban Studies, 20(3), 312–329.
- Kariem, M., & Ishmatuddin, M. (2021). *Digitalisasi Birokrasi dan Transparansi Pelayanan Publik di Kota Surabaya*. Jurnal E-Government, 5(2), 101–114.
- Pratama, R., & Fitriyah, N. (2021). *Transformasi Budaya Disiplin ASN dalam Kepemimpinan Tri Rismaharini*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 18(1), 88–97.



- Putri, A. D. (2022). *Perempuan dalam Kepemimpinan Publik: Studi Inspiratif Tri Rismaharini*. Jurnal Gender dan Masyarakat, 4(1), 56–70.
- Rahmawati, E. (2022). *Keteladanan dan Kepemimpinan Etis dalam Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Kota*. Jurnal Kepemimpinan dan Etika, 3(1), 11–23.
- Rahmi, I., & Wardiyanto, M. (2015). *Kepemimpinan Humanis dan Kinerja Sosial Pemerintah Kota Surabaya*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 6(2), 144–157.
- Santoso, B. (2021). *Blusukan dan Kepemimpinan Lapangan: Strategi Politik Pelayanan Publik*. Jurnal Komunikasi Pemerintahan, 8(1), 73–85.
- Susanto, R. (2021). *Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan Lokal: Kasus Tri Rismaharini di Surabaya*. Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2(1), 89–99.
- Wibowo, A. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Praktik Good Governance di Pemerintahan Daerah*. Jurnal Manajemen Publik, 12(3), 34–48.